

Implementation Of Government Expenditure In The Health, Education, Social Protection, And Public Services Sectors On Economic Growth In Indonesia

Implementasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Dewi Puji Astuti¹, Didit Purnomo^{2*}

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}

B300210179@student.ums.ac.id¹, dp274@ums.ac.id^{2*}

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of government expenditure in health, education, social protection, and public services sectors on Indonesia's economic growth. The research employs panel data combining time series and cross-section from 34 provinces during 2017–2018, sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Panel data regression using EViews software is applied to analyze the relationship. The dependent variable is economic growth, while the independent variables consist of government spending on health, education, social protection, and public services. The findings reveal that all independent variables simultaneously have a significant impact on economic growth. Partially, only education expenditure shows a positive and significant effect. This indicates that increasing government spending on education fosters economic growth by improving human capital quality. The results highlight the importance of prioritizing the education sector in fiscal policy to strengthen national competitiveness and achieve inclusive and sustainable economic growth.

Keywords : Data Panel, Economic Growth, Education Sector, Eviews, Government Expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel gabungan time series dan cross section dari 34 provinsi selama periode 2017–2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independen mencakup pengeluaran sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, hanya pengeluaran sektor pendidikan yang terbukti memiliki pengaruh positif signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah di bidang pendidikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya prioritas anggaran pada sektor pendidikan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk memperkuat daya saing nasional dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: EViews, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pendidikan, Data Panel.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat didunia, menghadapi tantangan besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Izza & Purnomo, 2024). Tahun 2017-2018 menjadi tahun yang krusial bagi perekonomian Indonesia karena menandai fase pemulihan ekonomi global pasca perlambatan dan volatilitas harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk faktor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan umum dan sebagainya (Lee et al., 2019). Pengeluaran pemerintah sangat berperan dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan

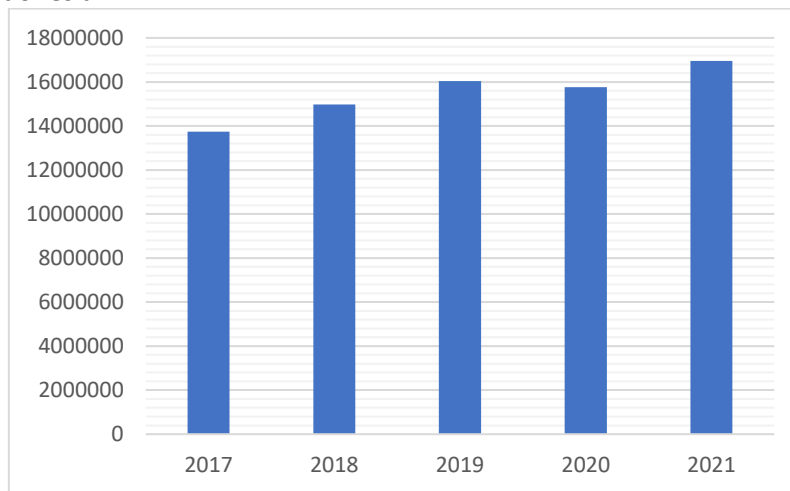
menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Susilo, 2023). Bank Dunia tahun 2017 mengeluarkan Laporan yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan publik wajib menghasilkan beberapa pembangunan seperti pemerataan, keamanan, dan pertumbuhan. Dengan laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memang dipengaruhi oleh kebijakan publik melalui pengeluaran pajak (Siti Aisyah, 2025). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang meningkatkan produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khotiawan, 2023). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri berperan sebagai tolak ukur prestasi dari perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode selanjutnya (Saéz et al., 2017). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum (Khotiawan, 2023).

Kesehatan merupakan salah satu isu sentral yang senantiasa menjadi fokus perhatian pemerintah di berbagai negara (Rasnino, 2022). Menurut Rostow, aktivitas pemerintah pada tahap awal pembangunan berorientasi pada penyediaan infrastruktur yang membutuhkan alokasi pengeluaran besar, termasuk untuk mendukung layanan sosial seperti program kesejahteraan dan kesehatan masyarakat (Pulungan et al., 2024). Pengeluaran tersebut diwujudkan melalui kebijakan belanja bantuan sosial yang dijalankan sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2018). Alokasi dana di sektor kesehatan menjadi salah satu komponen penting yang berkontribusi terhadap indikator kemiskinan (Primananda & Artha, 2023). Dalam konteks ini, belanja pemerintah di bidang bantuan sosial memiliki peran strategis. Namun, hasil penelitian oleh Indanazulfa Qurrota A'yun dan Irwandi (2022) berjudul "Government Health Expenditures on Economic Growth in ASEAN-9 Countries" menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-9.

Pendidikan juga menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi nasional, termasuk bagi Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah di bidang pendidikan (Warkawani et al., 2020). Wibowo, (2022) menegaskan bahwa pendapatan ekonomi daerah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki keterkaitan erat dengan investasi publik di sektor pendidikan (Irwandi, 2022). Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan porsi anggaran sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, hasil studi Rafika Wardani Pulungan et al. (2024) dalam penelitian berjudul "Impact of Government Expenditure on Education, Social Protection, Public Services, Infrastructure, Community Empowerment, Investment, and HDI on Economic Growth in Indonesia's 3T Regions" menemukan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, perlindungan sosial juga menjadi aspek krusial dalam strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Suriadi et al., 2023). Program-program seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan nasional, subsidi pangan, hingga program pensiun merupakan bagian integral dari sistem perlindungan sosial Indonesia yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat stabilitas ekonomi keluarga rentan (Gnangoin et al., 2019). Regina et al., (2025) menambahkan bahwa investasi di bidang perlindungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan tingkat kemiskinan. Namun, hasil riset yang dilakukan oleh Rafika Wardani Pulungan et al. (2024) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial di wilayah 3T justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana di sektor tersebut dalam jangka pendek dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi (Duwal & Suwal, 2024).

Pelayanan umum merupakan salah satu fungsi penting dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memfasilitasi pengembangan lingkungan sosial ekonomi yang baik, pelayanan umum merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah (Suleman & Resnawaty, 2017). Pelayanan umum mencakup berbagai aspek seperti layanan kependudukan, administrasi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, dan penanggulangan bencana, yang menjadi fondasi bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Suharto, 2015). Musgrave (2003:7) menyatakan bahwa peran pemerintah dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki standar hidup yang layak, di mana fungsi pemerintah di sini mencakup fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam penelitian yang berjudul "Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia" yang dilakukan oleh Siti Sriningsih, et.al., 2023 menyatakan bahwa sektor pelayanan umum memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Gambar 1. PDB Indonesia 2017-2021

Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Indonesia mengalami peningkatan yang cukup stabil dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017, nilai PDRB Indonesia tercatat sebesar Rp13.590 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14.839 triliun pada tahun 2018, dan terus naik menjadi Rp15.833 triliun pada tahun 2019. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan menjadi indikasi positif bahwa kebijakan pembangunan nasional berjalan sesuai harapan. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai PDRB menjadi Rp15.438 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Aktivitas produksi terganggu, konsumsi masyarakat menurun, serta investasi dan perdagangan mengalami perlambatan yang cukup tajam.

Walaupun pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai PDRB nasional yang mencapai Rp16.971 triliun. Proses pemulihan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah, seperti pemberian stimulus fiskal, bantuan sosial kepada masyarakat, percepatan vaksinasi, serta revitalisasi sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, dan jasa. Upaya tersebut memberikan optimisme baru terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang, meskipun dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga komoditas tetap menjadi tantangan yang harus diwaspadai (Rafi, 2023).

Melihat dinamika PDRB selama lima tahun terakhir, menjadi krusial bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk menelaah lebih dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

perubahan tersebut (Soleha & Fathurrahman, 2017). Dengan mempelajari tren PDRB, dapat diidentifikasi sektor-sektor yang paling rentan terhadap krisis sekaligus sektor yang menunjukkan ketahanan paling tinggi. Pemahaman ini akan membantu dalam perumusan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Untuk menciptakan arah pembangunan berkelanjutan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap pola pertumbuhan ekonomi agar kebijakan yang disusun dapat lebih efektif, adil, dan berdampak luas.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2020). Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1994) menekankan pentingnya peran pemerintah berfokus pada faktor-faktor internal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti inovasi, pengetahuan, dan investasi sumber daya manusia. Teori ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi historis menurut Friedrich List dari bukunya yang berjudul *Des Nationale System der Politichen Oikonomie*, menjelaskan sistem liberalisme yang *laissez-faire* (bebas) tidak dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal (Lail et al., 2024). Menurut List, pertumbuhan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan kebudayaan. Negara harus melindungi kepentingan yang lemah dalam masyarakat (Lazuardi, 2022).

Penelitian Terdahulu

Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Wagner menegaskan bahwa ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat secara proporsional. Hal ini menandakan bahwa peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi suatu negara semakin besar seiring pertumbuhan ekonomi (Desmawan & Syaifudin, 2020). Sementara itu, menurut teori Keynesian, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Pratiwi & Indrajaya, 2019). Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Mankiw, 2021).

Pengeluaran di sektor kesehatan menjadi aspek penting dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas nasional (Prakasa & Suparyati, 2022). Penelitian Pratama (2023) menemukan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur serta pelayanan kesehatan dasar berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan PDB, di mana kenaikan 1% anggaran kesehatan mampu meningkatkan PDB sebesar 0,3%. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Indanazulfa Qurrota A'yun dan Irwandi (2022) melalui studi berjudul *"Government Health Expenditures on Economic Growth in ASEAN-9 Countries"*, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-9.

Selanjutnya, investasi pada sektor pendidikan dipandang sebagai unsur mendasar dalam pembentukan modal manusia (Wahyuni et al., 2023). Temuan Widjajanti dan Rahman (2022) memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja dan inovasi. Dengan demikian, belanja pemerintah di bidang pendidikan memiliki hubungan positif dengan peningkatan produktivitas nasional. Namun, hasil berbeda disampaikan oleh Rafika Wardani

Pulungan et al. (2024) dalam penelitian berjudul *“Impact of Government Expenditure on Education, Social Protection, Public Services, Infrastructure, Community Empowerment, Investment, and HDI on Economic Growth in Indonesia’s 3T Regions”*, yang menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan temuan Juliani (2020).

Adapun program perlindungan sosial berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian Handayani et al. (2021), pelaksanaan program sosial yang efektif dapat mengurangi kesenjangan ekonomi serta memperkuat pertumbuhan yang inklusif. Kebijakan berupa bantuan dan jaminan sosial terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi domestik. Namun, hasil penelitian Rafika Wardani Pulungan et al. (2024) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial di wilayah 3T justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan belanja sosial di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat berasosiasi dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (Palaneven et al., 2018).

Kualitas pelayanan umum mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Menurut studi Nugroho dan Putri (2023), investasi dalam modernisasi pelayanan publik dan infrastruktur pelayanan umum memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Peningkatan kualitas pelayanan umum terbukti dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. berjudul *“Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia”* yang dilakukan oleh Siti Sriningsih, et.al., 2023 menyatakan bahwa sektor pelayanan umum memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menelaah pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang dianalisis berupa panel tahunan 34 provinsi selama 2017–2018, yang menggabungkan time series dan cross section, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemilihan metode data panel mengacu pada studi Rafika, (2023) berjudul *“Impact of Government Expenditure on Education, Social Protection, Public Services, Infrastructure, Community Empowerment, Investment, and HDI on Economic Growth in Indonesia’s 3T Regions.”*

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif yang mencakup daerah penelitian yaitu Indonesia. Data yang digunakan merupakan data time series dan cross section dari 34 provinsi dari tahun 2017-2018 dengan menggunakan software Eviews. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat makro dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk variabel independennya menggunakan Pengeluaran Sektor Kesehatan, Pengeluaran Sektor Pendidikan, Pengeluaran Sektor Perlindungan Sosial dan Pengeluaran Sektor Pelayanan Umum. Penelitian ini meneliti pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan, Pengeluaran Sektor Pendidikan, Pengeluaran Sektor Perlindungan Sosial dan Pengeluaran Sektor Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu).

Keterangan :

$$GROWTH_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PSK_{it} + \beta_2 PSP_{it} + \beta_3 PSPS_{it} + \beta_4 PSPU_{it} + \varepsilon_{it}$$

GROWTH : Pertumbuhan Ekonomi

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

PSK	: Pengeluaran Sektor Kesehatan
PSP	: Pengeluaran Sektor Pendidikan
PSPS	: Pengeluaran Sektor Perlindungan Sosial
PSPU	: Pengeluaran Sektor Pelayanan Umum
i	: Cross section
t	: Time series
ε	: Error term

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan CEM, FEM, DAN REM beserta hasil uji pemilihan model dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Hasil estimasi regresi data panel

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	12.01335	12.26534	12.23023
PSP	3.753162	4.817138	5.151193
PSK	1.427775	-1.351945	-9.952349
PSPU	-2.116428	-1.619789	-1.625545
PSPS	-2.645746	7.654429	3.372322
R ²	0.170780	0.998549	0.068167
Adjusted. R ²	0.118131	0.996760	0.009003
Statistik F	3.243758	558.1425	1.152172
Prob. Statistik F	0.017494	0.000000	0.340472

Uji Pemilihan Model

(1) Chow

Cross- Section $F(33,30) = 518.767306$; Prob. $F(33,30) = 0,0000$

(2) Hausman

Cross-Section random $\chi^2(4) = 12.330585$; Prob. $\chi^2 = 0,0151$

Sumber : BPS diolah

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik karena nilai prob.F pada uji chow sebesar 0,0000(<0,05) maka model yang dipilih FEM dan pada uji hausman prob.X² bernilai 0,0151(<0,05) maka model yang dipilih FEM, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik F dan statistik x² FEM bernilai 0,0000(<0,01). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi FEM, terlihat pada tabel 2 dan 3.

Table 2. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

$$PDRB_{it} = 12,26534 + 4,817138PSP_{it} - 1,351945PSK_{it} - 1,619789PSPU_{it} + 7,654429PSPS_{it}$$

(0.0970)* (0.1574) (0.4550)

(0.4896)

$R^2 = 0,998549$; DW = 3,885714; F. = 558,1425; Prob. F = 0,000000

Sumber: BPS, diolah. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistic t.

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi FEM eksis dengan probabilitas empirik statistik F bernilai 0.0000 (<0,01), serta koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9985. hal ini menunjukkan bahwa 99,85% variasi dalam PDRB dijelaskan oleh variasi dalam PSP, PSK, PSPU dan PSPS, sementara sisanya 0,15% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model terestimasi. Dari kelima variable dalam model ekonometrika, hanya satu variable, yakni PSP yang memiliki dampak

signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas statistic t masing-masing sebesar 0.0970(<0,1).

Variabel Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 4,817138, dengan pola hubungan linier-linier. Dengan kata lain, jika Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) naik 1%, maka PDRB juga akan naik sebesar 4,817138 juta rupiah. Sebaliknya, jika Pengeluaran Sektor Pendidikan (PSP) turun 1% maka PDRB akan turun sebesar 4,817138%.

5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas dapat disimpulkan variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah variabel pengeluaran sektor pendidikan (PSP). Pengeluaran sektor pendidikan (PSP) memiliki pengaruh positif yang berarti apabila pengeluaran sektor pendidikan (PSP) mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya ketika pengeluaran sektor pendidikan (PSP) mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Penelitian dengan judul “Implementasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, dan Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” penting dilakukan karena belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum menjadi prioritas dalam alokasi anggaran karena diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat daya saing, serta menciptakan iklim sosial-ekonomi yang stabil dan inklusif.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rafika Wardani Pulungan, et.al., 2024 yang berjudul “Impact of Government Expenditure on Education, Social Protection, Public Services, Infrastructure, Community Empowerment, Investment, and HDI on Economic Growth in Indonesia’s 3T Regions”, perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan variabel dependen yang dibahas, pada penelitian sebelumnya variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah, perlindungan sosial, pelayanan umum, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan indeks pembangunan manusia, sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum.

Dapat disimpulkan juga bahwa variabel pengeluaran sektor pendidikan (PSP), pengeluaran sektor kesehatan (PSK), pengeluaran sektor pelayanan umum (PSPU), dan pengeluaran sektor pelayanan sosial (PSPS) secara simpultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Duwal, N., & Suwal, S. (2024). Government Expenditure on Education, Educational Index, and Economic Growth in Nepal: An ARDL-ECM Approach. *Ekonomikalia Journal of Economics*, 2(2), 82–94. <https://doi.org/10.60084/eje.v2i2.205>
- Fadila, D., Ghofur, R. A., & Devi, Y. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.24042/slm.v4i2.20876>
- Fitriana Sari, I., & Rafi, M. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1080–1087. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476>
- Gnangoin, Y. T. B., Du, L., Assamoi, G. R., Edjoukou, A. J. R., & Kassi, D. F. (2019). Public spending, income inequality and economic growth in Asian countries: A panel GMM approach.

- Economies*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/economies7040115>
- Izza, M. N., & Purnomo, D. (2024). Analysis of Economic Growth Patterns and Regional Potential Sectors in Grobogan Regency Central Java in 2017–2021. *ICOEBS*, 2, 72–84. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_7
- Khotiawan, M. (2023). The Effect of Infrastructure on Economic Growth in Regencies and Cities in Special Region of Yogyakarta Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 41–47. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v11i1.4011>
- Lail, M. N., Dhia, D., & Mansis, I. R. (2024). Pengeluaran Negara untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Telaah APBN 2023. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3), 662–678.
- Lee, J. C., Won, Y. J., & Jei, S. Y. (2019). Study of the relationship between government expenditures and economic growth for China and Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226344>
- Primananda, A., & Artha, D. P. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(4), 11–20.
- Pulungan, R. W., Rahmanta, & Sembiring, S. A. (2024). Impact of Government Expenditure on Education, Social Protection, Public Services, Infrastructure, Community Empowerment, Investment, and HDI on Economic Growth in Indonesia's 3T Regions. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics*, 3(3), 725–738. <https://sinomicsjournal.com/index.php/SJ/article/view/355>
- Qurrota A'yun, I., & Irwandi. (2022). Government Health Expenditures on Economic Growth in ASEAN-9 Countries. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 128–132. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i1.468>
- Rasnino, C. A. (2022). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2014-2019. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.29.Cass>
- Regina, R., Rabb, A. F. A., Andriani, S., & Irwandi, I. (2025). Contribution of Health and Social Protection Expenditure to Human Development in Indonesia: Evidence from Sulawesi Region. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(1), 22–30. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i1.285>
- Saéz, M. P., Álvarez-García, S., & Rodríguez, D. C. (2017). Government expenditure and economic growth in the European Union countries: New evidence. *Bulletin of Geography. Socio-Economic Series*, 36(36), 127–133. <https://doi.org/10.1515/bog-2017-0020>
- Sasongko, H. E., & Wibowo, P. (2022). Government Spending and Regional Economic Growth: the Mediating Effect of Human Development Index. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 230. <https://doi.org/10.26418/jebik.v11i2.52229>
- Siti Aisyah, A. M. (2025). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(3), 2574–2586. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.14670>
- Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 40–52.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada*

- Masyarakat*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>
- Suriadi, I., Sriningsih, S., & Fatimah, S. (2023). Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(5), 1933–1956. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i5.3957>
- Susilo, S. A. K., Hayati, B., & Pujiati, A. (2023). The Linkage Among Economic Growth, Education and Health: Empirical Study in Java Island. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 24(1), 24–39. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.20194>
- Wahyuningrum, P. S., & Juliprijanto, W. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Prosiding Konvergensi Sains & HUMANIORA*, 2(6), 268–276.
- Warkawani, C. M., Chrispur, N., & Widiawati, D. (2020). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2008-2017. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i1.4759>